
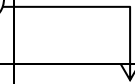


 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – DIY 55198 Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 - 581675 Website : www.ptun-yogyakarta.go.id Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id</p>	Nomor SOP	SOP/022/Ecourt/2024
	Tanggal Pembuatan	25 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 Juni 2024
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING SECARA E-COURT		

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 7. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya 9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 46/KPTUN.W3.TUN3/SK.HK.1.2.5/I/2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA 2. S1-Hukum

<p>Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaan pada PTUN Yogyakarta Tahun 2024</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan;</p> <p>11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>12. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Panitera Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP Penerimaan Perkara</p> <p>2. SOP Pemeriksaan Perkara Gugatan/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali</p>	<p>1. Formulir Check List</p> <p>2. Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>3. Komputer / Laptop / SIPP / E Court</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.</p>	<p>Arsip Perkara Aktif dan Inaktif Kepaniteraan Perkara</p>

PROSEDUR :

1. Kasir meneruskan informasi sisa panjar perkara ke bendahara
2. Bendahara mentransfer sisa panjar perkara kepada penggugat
3. Panitera memverifikasi transfer pengembalian sisa panjar

No	Aktivitas				Mutu Baku		
		Panitera	Kasir	Bendahara	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Meneruskan informasi sisa panjar perkara ke bendahara				- E-mail - Jaringan internet	1 jam	- Pemberitahuan
2.	Mentransfer sisa panjar perkara kepada penggugat				- No rekening penggugat atau kuasa hukumnya yang terdaftar di e-Court - Jaringan internet - Kendaraan dinas	3 jam	- Bukti setor transfer pengembalian sisa perkara
3.	Memverifikasi transfer pengembalian sisa panjar				- E-mail - Jaringan internet	3 jam	- Bukti setor transfer pengembalian sisa perkara